

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan, yaitu:

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu Pertama**

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Nurul Mahfudhotin, dan M.Syam'un Rosyadi. Pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan *Good Corporate Governance* Pada BPRS ".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mahfudhotin, Nurul. Syam'un, M. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan *Good Corporate Governance* Pada BPRS. *Journal Of Islamic Economics Studies*. Hal 166-180. Diakses pada 29 Maret 2023

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, ucapan atau gambar yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan catatan pada saat observasi pada subyek serta dokumentasi dari sumber yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai prinsip *good corporate governance* yang telah terlaksana dengan baik melalui transparansi menyampaikan informasi dalam satuan kerja dan transparansi publikasi kondisi bank kepada OJK membuktikan bahwa BPRS Lantabur tidak dalam intervensi pihak lain dan sesuai aturan perundang-undangan, selanjutnya jajaran organisasi dan wewenang yang jelas membantu BPRS Lantabur dalam pengelolaan secara professional, kepatuhan atas regulator atau perundang-undangan membuktikan bahwa BPRS Lantabur dalam pengawasan pemerintah dan membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya, serta sistem bagi hasil telah adil dalam transaksi antara bank dan nasabah. Maka proses *transparansi, akuntability, responbility, independensi, dan fairness* tersebut membantu melindungi para *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang ada di BPRS Lantabur.

### 2.1.2 Penelitian Terdahulu Kedua

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Maya Sari, Seprida Hanum, dan Rahmayati. Pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia”.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi penelitian menggunakan proses dokumentasi dengan mengumpulkan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diartikan sebagai suatu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, dan mendeskripsikan subjek atau objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau apa adanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai konsultan pajak. Adapun faktor-faktor yang diuji antara lain motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep dan prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko melibatkan organ internal perbankan. Seluruh unsur internal perbankan seperti pemegang saham, forum RUPS, komisaris, direksi, pengurus komite audit, auditor internal dan

---

<sup>4</sup> Sari, Maya. Seprida, Hanum. Rahmayati. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. Owner Riset & Jurnal Akuntansi. Hal. 1540-1554. Diakses Pada 29 Maret 2023.

eksternal serta pegawai harus dapat membentuk lingkaran dan situasi kerja yang saling mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya dalam menghadapi dan mengelola berbagai jenis risiko yang secara khusus memiliki keunikan tersendiri yang hanya ada di perbankan.

### 2.1.3 Penelitian Terdahulu Ketiga

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Fahrizal Maizi Ahmad dan Pembimbing: Mia Rosmiati. Pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat”.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif di mana penelitian kualitatif sering digunakan untuk meneliti dalam bidang ilmu sosial dan terhadap permasalahan yang tidak dapat diteliti secara kuantitatif. Penelitian kualitatif juga dapat menambah kekayaan referensi dalam penelitian kuantitatif.

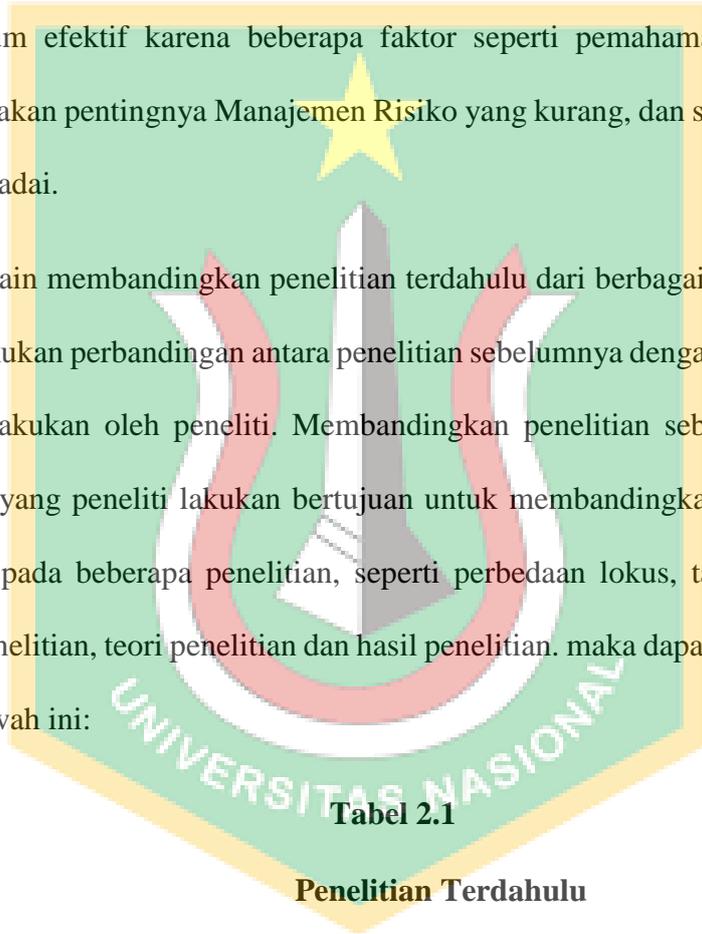
Manajemen Risiko di lingkungan pemerintah saat ini masih belum diterapkan secara efektif di seluruh institusi pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum efektif jika dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lain yang sudah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Manajemen Risiko. Padahal Manajemen Risiko mampu membantu pemerintah dalam pencapaian

---

<sup>5</sup> Ahmad Maizi, Fahrizal. Rosmiati, Mia. (2019). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal 1182-1192. Diakses Pada 29 Maret 2023

tujuan dan mewujudkan *Good Governance* serta sudah ada peraturan untuk menerapkannya, yaitu PP No. 60 tahun 2008. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan *Good Governance*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum efektif karena beberapa faktor seperti pemahaman yang kurang, kesadaran akan pentingnya Manajemen Risiko yang kurang, dan sumber daya yang tidak memadai.

Selain membandingkan penelitian terdahulu dari berbagai peneliti, peneliti juga melakukan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk membandingkan perbedaan dan kesamaan pada beberapa penelitian, seperti perbedaan lokus, tahun penelitian, metode penelitian, teori penelitian dan hasil penelitian. maka dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Peneliti  | Peneliti                                   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|---|--|---|---|
| 1  | Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan <i>Good Corporate Governance</i> Pada BPRS. | Nurul Mahfudhotin, dan M. Syam'un Rosyadi. | Persamaan dengan penelitian yaitu fokus membahas manajemen risiko yang mempertahankan <i>Good Corporate</i> | Lokus penelitian di lingkungan bank. Sedangkan peneliti di instansi pemerintah. |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  | <i>Governance.</i>   |   |
| 2 | Analisis Manajemen Risiko Dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. | Maya Sari, Seprida Hanum, dan Rahmayati. | Persamaan peneliti yaitu tentang manajemen risiko.                         | Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. |
| 3 | Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat                  | Fahrizal Maizi Ahmad dan Mia Rosmiati.   | Persamaan peneliti yaitu membahas manajemen risiko di instansi pemerintah. | Teori yang digunakan <i>good governance</i> dan manajemen risiko                                |

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 *Good Governance*

Istilah *governance* sendiri sudah cukup lama dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik, sejak masa Woodrow Wilson, sekitar 125 tahun yang lalu. Sedangkan definisi baru *governance*, muncul sekitar 15 tahun yang lalu, bersamaan dengan berkembangnya gerakan pembiayaan internasional untuk negara-negara berkembang. Secara bahasa pengertian *good* berarti baik, dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman. Pemahaman pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional

dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>6</sup>

Sedangkan *governance* secara istilah adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana sebuah keputusan di implementasikan. *Good governance* diartikan sebagai *governance* yang baik. *Governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks diantaranya *coorporate governance*, *Government governance*, *international governance*, *nasional governance* dan *local governance*.<sup>7</sup>

Secara umum *good governance* merupakan interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, dimana lembaga pemerintahan memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta. John Healey dan Mark Robinson mengatakan bahwa *good governance* adalah kegiatan organisasi negara yang berimplikasi pada perumusan kebijakan yang berefek pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Baik dalam arti mengikuti kaidah-kaidah tertentu sebagai prinsip-prinsip dasar *good governance*. *Good Governance* juga merupakan konsep yang kolektif, yang melibatkan seluruh

---

<sup>6</sup> Sunarya, Impelementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah, (Jakarta: Irjen Depag, 2007), hal.72.

<sup>7</sup> Dwi Martini, Good Governance Dalam Pelayanan Publik, dalam buku yang berjudul Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance dalam Pemerintahan, (Jakarta ; Irjen Depag RI, 2007) . H .4-5.

<sup>8</sup> Ibid 209-210

tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good corporate*.

*Good governance* juga berimplikasi pada prinsip-prinsip organisasi yang akuntabel, transparan, partisipatif, keterbukaan, dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum. Prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), ada beberapa karakteristik dari *good governance* adalah:<sup>9</sup>

1. *Participation* (partisipasi), setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law* (berbasis hukum), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud *good and clean governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.

---

<sup>9</sup> Ibid 210-214

3. *Transparency* (terbuka), transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksanaan pemerintah, baik pusat maupun dibawahnya.
4. *Responsiveness* (responsif), sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial kualifikasi. Etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika sosial menuntut agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
5. *Consensus orientation* (orientasi consensus), paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
6. *Equity* (kesetaraan), asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan agar setiap pelaksanaan pemerintahan dapat bersikap dan berperilaku adil, khususnya dalam pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. *Effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien), asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.

8. *Accountability* (akuntabel), untuk menunjang akuntabilitas, pengawasan menjadi kunci utama evaluasi dan kontrol dari pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan.

### 2.2.2 Manajemen Risiko

Menurut Djojosoedarsono manajemen risiko ialah fungsi manajemen terutama dalam manajemen risiko organisasi ataupun perusahaan, keluarga dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup perencanaan, pengorganisasian, menyusun, mengelola atau mengkoordinasikan dan memantau sekaligus evaluasi penanggulangan risiko.

Kemudian secara bertahap, perusahaan harus mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Berikut adalah tahap-tahap manajemen risiko menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang dituliskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### a. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini harus dilakukan oleh pihak perusahaan yakni melakukan identifikasi segala bentuk risiko yang dialami oleh perusahaan.

#### b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini pula perusahaan mulai memahami identifikasi risiko dan mengetahui risiko mana yang menjadi prioritas untuk ditangani.

---

<sup>10</sup> Fahmi Irham, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*, (Jl.Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, 2012) hal.281

c. Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahapan ini perusahaan sudah mampu mengukur skala yang dirancang seperti memakai metodologi penelitian baik berbentuk kualitatif atau kuantitatif.

d. Menempatkan alternatif-alternatif

Pihak manajemen perusahaan telah mengelolah data yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif.

e. Melaksanakan alternatif yang dipilih

Setelah alternatif dipilih pada tahap ini pihak manajer membentuk tim untuk melaksanakan alternatif tersebut. Maka perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) besertakan rincian dana, rincian biaya yang akan dialokasikan dan disetujui oleh bagian keuangan.

f. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Setelah pelaksanaan pengontrolan alternatif, tim manajemen membuat laporan kepada pihak manajer perusahaan dan ini dilakukan bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peneliti akan menggunakan teori menurut Hopkin (2017) menjelaskan bahwa tentang manajemen risiko terdapat 7 kriteria yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko, dilakukan berdasarkan keadaan dimana risiko dapat terwujud. Hal ini membutuhkan informasi dari pengalaman pada suatu perusahaan.
2. Menganalisis sumber daya, berdasarkan kriteria risiko dan besarnya risiko yang ditetapkan.
3. Evaluasi risiko, dilakukan untuk mengetahui besarnya kemungkinan dan menghasilkan sumber potensi risiko dan akan dicatat dalam daftar risiko.
4. Merespons risiko, memberikan penanganan yang tepat. Opsi penanganannya yaitu menoleransi, memperlakukan, mentrasfer, dan mengakhiri.
5. Mengontrol sumber daya, dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat perusahaan berguna dalam mempertahankan aktivitas pengendalian.
6. Perencanaan reaksi, memulihkan kondisi perusahaan akibat dampak yang ditimbulkan risiko sehingga aktivitas dapat berjalan dengan normal.
7. Pelaporan dan pemantauan, terhadap kinerja risiko serta tindakan yang diusulkan. Apabila terdapat peristiwa yang tidak berjalan sesuai harapan, dapat dikomunikasikan ke bagian manajemen risiko untuk ditinjau kembali

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>11</sup> Dengan adanya kerangka pemikiran, pembaca dapat mengetahui alur

---

<sup>11</sup> Sugiyono, "metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". (Bandung:ALFABETA,2013),hal 60.

logika penulis sehingga dapat ditemukan secara terperinci hal yang mendasar dalam penelitian tersebut.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

